



Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep)

Astri Furqani¹, Rusnani²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja

¹astri@wiraraja.ac.id, ²rusnani08@gmail.com

Keywords:

Regional Inspectorate, industrial revolution 4.0, mutual-brackets

Abstract

Many local governments have implemented information technology-based systems in their business processes such as e-budgeting, e-procurement, electronic licensing and other applications. This phenomenon must be anticipated by the Regional Inspectorate. The use of information technology by the Regional Inspectorate in Internal Supervision of the implementation of Regional government is a necessity in the era of the industrial revolution 4.0. The purpose of this research is to determine the readiness of the Inspectorate of Sumenep Regency in the use of information technology in the internal supervision of the implementation of the regional government of Sumenep Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type case study method. The informants in the study were four people, namely one structural official and three functional auditors, with a minimum work experience of four years. The process of testing the validity of the data uses triangulation. The data analysis in this study used the Mutula and Brakel models. Based on the results of the analysis using the Mutula-Brakel model with 5 components, there are 2 components that are not fully ready, namely the information readiness for the application of IT under supervision, represented by server availability and insufficient information management guidelines. Server procurement is constrained by refocusing due to the COVID-19 pandemic, but this has been re-budgeted for in 2021. In addition, infrastructure readiness for IT implementation under supervision is not fully adequate.

Kata Kunci:

Inspektorat Daerah, Revolusi Industry 4.0, Mutula-Brakel

Abstrak

Pemerintah daerah telah banyak yang menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dalam proses bisnisnya seperti e-budgeting, e-procurement, perijinan secara elektronik dan aplikasi-aplikasi lainnya. Fenomena ini harus diantisipasi oleh Inspektorat Daerah. Penggunaan teknologi informasi oleh Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Internal

penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan suatu keniscayaan di era revolusi industri 4.0. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesiapan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam penggunaan teknologi informasi pada pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda studi kasus tipe deskriptif. Informan dalam penelitian itu empat orang yaitu satu orang pejabat struktural dan tiga orang pejabat fungsional auditor, dengan pengalaman kerja minimal empat tahun. Proses pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Mutula dan Brakel. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan model Mutula-Brakel dengan 5 komponen terdapat 2 komponen yang belum sepenuhnya siap yaitu pada Kesiapan informasi (information readiness) untuk penerapan TI dalam pengawasan yang diwakili oleh ketersediaan server dan pedoman pengelolaan informasi masih belum memadai. Pengadaan server terkendala oleh adanya refocusing akibat pandemi covid 19, namun hal tersebut sudah dianggarkan kembali di tahun 2021. Selain itu juga pada Kesiapan infrastruktur untuk penerapan TI dalam pengawasan belum sepenuhnya memadai.

Pendahuluan

Pengawasan internal Pemerintah adalah Seluruh proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan organisasi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (PP 60/2008). Pengawasan internal yang baik dan memadai sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena banyaknya permasalahan yang timbul dan semakin rumit.

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah merupakan salah satu unsur APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sehingga Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Kementrian/ Lembaga, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Pengawas Internal yang ada di masing-masing lembaga pemerintah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kembali

peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP 12/2017 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, revidu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Boynton, *et al.* (2003) dalam Gamar dan Djamhuri (2015) menyebutkan bahwa pengawasan internal berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan membuat rekomendasi perbaikan. Akuntabilitas penyelenggaraan suatu organisasi dapat terwujud melalui pengawasan internal sebagaimana disebutkan dalam Togiman (2000) dan Sawyer, *et al.* (2006).

Perkembangan dunia pada saat ini berada pada era Revolusi Industri 4.0. Salah satunya ditandai dengan perubahan lanskap proses bisnis pemerintahan yang berbasis internet dan teknologi informasi memberikan tantangan yang cukup berat dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah telah banyak yang menerapkan sistem berbasis TI dalam proses bisnisnya seperti *e-budgeting*, *e-procurement*, perijinan secara elektronik dan aplikasi-aplikasi lainnya. Fenomena ini harus diantisipasi oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan Internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah di waktu mendatang akan menggunakan berbagai macam teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi oleh Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Internal penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan suatu keniscayaan di era revolusi industri 4.0, oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai kesiapan Inspektorat Daerah dalam penggunaan teknologi informasi pada pengawasan internal. Penelitian yang mendekati yaitu dilakukan oleh Ahmi, Saidin dan Abdullah (2014) mengenai adopsi Teknologi informasi oleh auditor internal sektor publik di Malaysia Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pentingnya Teknologi Informasi bagi auditor internal, terutama dalam mencapai efektivitas dan efisiensi audit, dan secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas audit yang memberikan dampak besar bagi perekonomian .

Inspektorat Kabupaten Sumenep dijadikan sebagai situs penelitian dalam penelitian ini. Pemilihan Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai situs penelitian dikarenakan Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah mendapatkan predikat level 3 Kapabilitas APIP pada tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Predikat level 3 Kapabilitas APIP yang diperoleh Inspektorat Kabupaten

Sumenep ini merupakan sebuah capaian yang prestisius, dimana hanya terdapat 4 (empat) Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkannya. Kapabilitas APIP Level 3 berarti APIP diharapkan berperan sebagai penjamin mutu, mengawal pencapaian tujuan strategis daerah dan sebagai *consulting* yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Inspektorat Kabupaten Sumenep telah berhasil mengawal maturitas penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Sumenep, dengan didapatkannya predikat Level 3 Maturitas SPIP pada tahun 2019.

Metode

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus tipe deskriptif. Alasan peneliti memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tipe deskriptif karena peneliti berusaha mengungkapkan secara mendalam tentang kesiapan Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumenep dan menganalisis permasalahan tersebut sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Informan Penelitian

Peneliti menentukan 4 (empat) orang informan dalam penelitian ini yang dianggap paling mengetahui tentang penelitian yang dilakukan. Empat orang informan tersebut terdiri dari satu orang Pejabat Struktural dan tiga orang Pejabat Fungsional Auditor di Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan pengalaman kerja minimal empat tahun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu triangulasi (gabungan) antara observasi (pengamatan), *in depth interview* (wawancara mendalam) dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu buku catatan, alat perekam audio/ video dan kamera.

4. Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesiapan beserta kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam penggunaan

teknologi informasi dalam pengawasan internal. Analisis data menggunakan model Mutula dan Brakel. Model Mutula-Brakel menganalisis kesiapan penggunaan Teknologi Informasi pada Suatu Lembaga menggunakan 5 komponen yaitu : Kesiapan Informasi (*Information Readiness*), Kesiapan Lembaga (*Enterprise Readiness*), Kesiapan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Readiness*), Kesiapan Infrastruktur (*ICTReadiness*) dan Kesiapan Lingkungan Eksternal (*external environment readiness*(Mutula dan Brakel,2006). Proses analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut seperti membuat transkrip data hasil wawancara dengan informan. Menyusun data hasil wawancara dari informan. Data dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan kesamaan jenis data. Data hasil wawancara yang telah dikelompokkan digabungkan dengan data hasil observasi dan analisis dokumen. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis sesuai dengan 5 komponen dalam model Mutula-Brakel sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Setelah analisis selesai maka diperoleh kesimpulan untuk menjawab Rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Sumenep

Inspektorat Kabupaten Sumenep pada awal terbentuknya bernama Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumenep. Selanjutnya nama tersebut mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir kali pada tahun 2004 sampai dengan sekarang menggunakan nama Inspektorat Kabupaten Sumenep. Akhir tahun 2019, terdapat perubahan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sumenep dengan adanya penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu yang diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep. Inspektorat Kabupaten Sumenep merupakan APIP di Kabupaten Sumenep yang melakukan pengawasan internal seperti dimaksud dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

2. Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Kabupaten Sumenep

Inspektorat Kabupaten Sumenep selama ini sudah memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas dalam berbagai bentuk aplikasi. Aplikasi yang

dikelola dan dikembangkan sendiri oleh Inspektorat yaitu website pengaduan atau *whistle blowing system* dengan alamat wbs.sumenepkab.go.id. Selain itu terdapat juga Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP) yang dikembangkan oleh BPKP dan digunakan di Inspektorat Kabupaten Sumenep sejak tahun 2015. SIM HP ini bersifat intranet.

Aplikasi lainnya yaitu aplikasi dari pihak eksternal atau dikembangkan oleh OPD lainnya namun juga dioperasikan di Inspektorat. Aplikasi ini antara lain Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) milik BAPPEDA dan BPPKAD, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) milik BKPSDM, Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIMARDI) milik dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan banyak lainnya. Selain itu Inspektorat Kabupaten Sumenep mempunyai website dengan alamat www.inspektorat.sumenepkab.go.id. Inspektorat Kabupaten Sumenep merencanakan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi yang bersifat lebih teknis ke pengawasan.

Analisa kesiapan penggunaan Teknologi Informasi pada pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah di Inspektorat Kabupaten Sumenep menggunakan model Mutula-Brakel dengan 5 komponen yaitu : Kesiapan Informasi (*Information Readiness*), Kesiapan Lembaga (*Enterprise Readiness*), Kesiapan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Readiness*), Kesiapan Infrastruktur (*ICT Readiness*) dan Kesiapan Lingkungan Eksternal (*external environment readiness*). Pembahasan mengenai hal tersebut disajikan dalam pembahasan sebagai berikut :

a. Kesiapan Lembaga (*Enterprise Readiness*)

Bagian ini membahas kesiapan organisasi dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam implementasi teknologi informasi pada pengawasan internal. Peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan lembaga mewawancarai bapak FF selaku kasubbag di Sekretariat yang menangani masalah Teknologi Informasi (TI). Hal yang pertama kali ditanyakan yaitu apakah Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah mempunyai dokumen rencana penerapan TI ? Menurut narasumber FF, Inspektorat Kabupaten Sumenep mempunyai Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Tahun 2019-2022. Hal tersebut sebagaimana pernyataan FF berikut ini :

“Kami sudah menyusun Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Tahun 2019-2022. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam hal pengembangan TI di Inspektorat Kabupaten Sumenep. Dokumen

tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan TI kami ke depan mulai dari aspek kebijakan, infrastruktur, SDM dan aplikasi”

Pernyataan FF di atas menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan pedoman dalam pengembangan IT Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apa saja yang tercantum dalam dokumen tersebut ? FF menjelaskan bahwa dalam Dokumen tersebut terdapat beberapa aplikasi yang akan digunakan maupun dikembangkan oleh Inspektorat. Selain itu aplikasi tersebut juga menjelaskan tahapan-tahapan per tahun mengenai apa yang harus dilakukan dan dicapai dalam rangka pengembangan TI

Sebagaimana dokumen yang kami dapatkan dari Bapak FF, pengembangan TIK di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep mempertimbangkan beberapa komponen utama yaitu:

- 1) Pengembangan Kebijakan. Fungsi dan tujuannya adalah untuk menyediakan payung hukum dari pengembangan TIK agar selaras dengan tugas dan fungsi di Inspektorat Kabupaten Sumenep.
- 2) Infrastruktur, Pengembangan TIK tidak akan berjalan tanpa kualitas layanan infrastruktur yang baik. Rencana pengembangan TIK ini juga mencakup pengembangan infrastruktur.
- 3) Aplikasi, Salah satu dari wujud pengembangan TIK di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah peningkatan kualitas aplikasi untuk e-goverment. Oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan aplikasi menjadi salah satu fondasi utama pada rencana pengembangan TIK.
- 4) SDM (Sumber daya Manusia) dan informasi, Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk melakukan peningkatan dari SDM serta data dan informasi sehingga pengembangan TIK dapat berjalan dengan baik.

Pengembangan IT yang direncanakan terutama terkait pengembangan Sistem Informasi, menurut FF diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan internal sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat Kabupaten Sumenep. Sistem informasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1) Sistem Informasi yang berkaitan dengan teknis pengawasan dan Sistem Informasi pendukung pengawasan. Selanjutnya FF menambahkan bahwa Sistem Informasi yang berkaitan dengan teknis pengawasan

contohnya yaitu e-audit, e-controlling, aplikasi pemantauan tindak lanjut. Sedangkan Sistem Informasi pendukung pengawasan antara lain arsip digital, SIMWAS dan masih banyak lainnya

Selanjutnya FF menjelaskan, seharusnya menurut dokumen perencanaan tersebut pada tahun ini sudah beroperasi aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan dan arsip digital karena pengembangan aplikasi tersebut sudah dianggarkan, namun belum terlaksana akibat adanya refocusing anggaran terkait pandemic covid 19.

Hal selanjutnya yang menjadi pembahasan yaitu Keberadaan bagian manajemen informasi di Inspektorat Kabupaten Sumenep. Bapak FF mengakui bahwa keberadaan bagian manajemen informasi yang dibentuk secara tertulis dan khusus menangani manajemen informasi sampai dengan saat ini belum ada. FF selama ini hanya ditunjuk secara informal untuk menangani manajemen informasi, khususnya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan. Bapak FF selama ini berperan sebagai orang yang mempersiapkan penerapan TI di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep. Sehubungan tugasnya tersebut, Bapak FF bersama 2 (dua) orang rekannya melakukan studi banding Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) ke Inspektorat Kabupaten Lumajang .

Kesiapan lembaga dalam penerapan TI terhambat dengan adanya pandemi covid 19. Pengembangan TI sebenarnya sudah berjalan dengan baik yang dimulai dengan proses penyusunan dokumen perencanaan pengembangan TI. Mengenai bagian manajemen informasi yang khusus menangani TI, bapak FF menyatakan di akhir tahun 2020 atau paling lambat awal tahun 2021 tim tersebut akan dibentuk. Pengembangan Sistem Informasi yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020, sudah dianggarkan kembali di tahu 2021. Kesiapan Lembaga dalam penerapan TI untuk pengawasan internal sudah cukup siap, tinggal menunggu pelaksanaannya pada tahun 2021.

b. Kesiapan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Readiness*)

Jumlah personil Inspektorat Kabupaten Sumenep sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) orang. Dari jumlah tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) orang pejabat fungsional auditor. Pejabat fungsional auditor atau selanjutnya disingkat auditor adalah PNS yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus yang dibuktikan dengan sertifikat dalam hal melaksanakan pengawasan internal. Auditor nantinya yang akan memanfaatkan penerapan teknologi informasi dalam tugasnya sebagai pengawas internal.

Sebagaimana data kepegawaian yang didapatkan peneliti, dari 25 auditor, yang berlatar belakang pendidikan bidang IT hanya 1 (satu) orang yaitu Bapak AK, sedangkan sisanya dari berbagai latar belakang seperti akuntansi, teknik, administrasi dll. Bapak AK merupakan auditor muda dengan pengalaman kerja selama 12 (dua belas) tahun.

Peneliti selanjutnya mewawancarai bapak AK dalam rangka mendapatkan informasi tentang kesiapan SDM Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam penerapan TI untuk pengawasan Internal. Menurut AK, auditor cukup siap dalam penerapan IT untuk pengawasan. Dari pernyataan AK juga menegaskan bahwa auditor di Inspektorat Kabupaten Sumenep pasti bisa menerapkan TI dalam pengawasan internal walau yang berlatar belakang pendidikan TI hanyalah dirinya. Hal tersebut dikarenakan semua auditor sudah bisa mengoperasikan komputer seperti aplikasi word dan excel, dimana hal tersebut merupakan syarat minimal untuk dapat menerapkan TI. Namun AK juga menambahkan bahwa mungkin pada awalnya, auditor yang lain masih kesulitan untuk dapat langsung sempurna dalam penerapan TI tersebut. Sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan terus menerus mengenai TI tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh KH, auditor madya dengan pengalaman kerja 14 (empat belas) tahun sebagai berikut :

“teman-teman pasti bisa menggunakan TI dalam pengawasan. Contohnya saya....saya berlatar belakang pendidikan administrasi, namun saya yakin pasti bisa dan mampu menggunakan TI dalam pengawasan. Sehari-hari saya juga bekerja dengan komputer. Selain itu, teman-teman juga berpengalaman dalam memanfaatkan TI, lihat saja waktu reviu RKA di SIMRAL dan SIPD. Teman-teman mungkin hanya awalnya saja yang masih kesulitan, lama-lama pasti terbiasa”

Peneliti juga mengkonfirmasi auditor bernama HR terkait kesiapan SDM Auditor Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam penerapan TI untuk pengawasan. HR juga menjelaskan sebagai berikut bahwa semua harus siap dalam penerapan TI untuk pengawasan karena hal tersebut adalah suatu keniscayaan. Salah satu contohnya yaitu penggunaan SISWASKEUDES (Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa) untuk pengawasan pengelolaan dana desa dan penggunaan aplikasi lainnya seperti SIMWAS. Walaupun HR berlatar belakang sarjana kimia, tetapi melek TI karena baginya TI itu bisa dipelajari. Mungkin yang menjadi hambatan terbesar karena malas belajar saja dan mindset masih menggunakan mindset lama.

Beberapa narasumber dari kalangan auditor menyatakan bahwa terkait kesiapan SDM untuk penerapan TI dalam pengawasan, auditor sudah sangat siap. Hal tersebut dikarenakan semua auditor sudah mampu dalam mengoperasikan komputer dan juga sebelumnya sudah pernah bersentuhan dengan TI. Namun kesulitan di tahap awal dimungkinkan terjadi dan akan semakin mudah seiring berjalannya waktu. Hal yang paling penting terkait kesiapan SDM yaitu adanya sosialisasi dan pelatihan terus menerus terkait penerapan TI tersebut.

Jika pada sisi SDM auditor sudah cukup siap, bagaimana dengan kesiapan pegawai di sekretariat sebagai admin dari setiap pengoperasian TI atau sistem informasi penunjang pengawasan seperti arsip digital dan SIMWAS ? Peneliti kembali mewawancarai bapak FF selaku Kasubbag di Sekretariat mengenai hal tersebut. FF menyatakan bahwa untuk di sekretariat, hanya 1 (satu) orang yang bisa diandalkan untuk menjadi admin dari TI/Sistem Informasi karena yang bersangkutan merupakan lulusan D3 Sistem Informasi. Namun AF juga menambahkan bahwa jika hanya 1 (orang) tenaga ahli TI, maka akan kesulitan, sehingga direncanakan untuk merekrut tenaga khusus yang menangani TI sebagaimana yang ada di Inspektorat Kabupaten Lumajang. Hal tersebut untuk memperlancar pengoperasian TI.

Selanjutnya, menurut FF dalam pengembangan kompetensi SDM terkait TI maka akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan TI dalam pengawasan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun dengan mengirimkan personil ke pelatihan/Bimtek yang diselenggarakan pihak eksternal. Agenda terdekat yaitu Bimbingan Teknis SISWASKEUDES dengan mendatangkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

c. Kesiapan Informasi (*Information Readiness*)

Pada bagian ini, akan dibahas kesiapan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam bidang informasi. Salah satu yang penting dari bagian ini yaitu ketersediaan infrastruktur penyimpanan informasi (server). Menurut bapak FF, pembelian server sebenarnya sudah dianggarkan pada tahun ini (2020) namun karena adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemic covid 19, maka anggaran tersebut dihapus. Pembelian server dianggarkan kembali pada tahun 2021.

Selanjutnya, bapak FF menjelaskan bahwa walaupun sebelumnya Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah menggunakan aplikasi berbasis TI seperti SIM HP, namun diakui pedoman pengelolaan informasi masih belum pernah dibuat. Hal tersebut

disebabkan karena faktor ketidaktahuan bahwa setiap penerapan TI diperlukan adanya pedoman tertulis tentang pengelolaan informasi. Pedoman tersebut berfungsi sebagai pegangan bagi setiap pengguna informasi. Pedoman tersebut juga berisi prosedur pengelolaan informasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak FF sebagai berikut :

“kami belum mempunyai pedoman pengelolaan informasi. Termasuk juga SOP terkait penyimpanan dan sharing informasi. Memang kami belum terpikir ke hal tersebut karena selama ini kami menjalankan beberapa aplikasi tanpa memperhatikan hal tersebut. Ke depan kami memang harus mempunyai pedoman itu karena akan semakin kompleksnya jenis aplikasi dan penerapan TI lainnya di kami. Insyaallah awal tahun depan kami sudah menyusun pedoman tersebut”

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan informasi Inspektorat Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh ketersediaan server dan pedoman pengelolaan informasi masih belum memadai. Pengadaan server terkendala oleh adanya refocusing akibat pandemi covid 19, namun hal tersebut sudah dianggarkan kembali di tahun 2021. Sedangkan belum tersedianya pedoman pengelolaan informasi disebabkan oleh ketidaktahuan dari pengelola informasi terhadap pentingnya ketersediaan pedoman tersebut sebagai acuan bagi setiap pengguna informasi. Pengelola Teknologi Informasi merencanakan pembuatan pedoman pengelolaan informasi pada awal tahun 2021.

d. Kesiapan Infrastruktur (*ICT Readiness*)

Salah satu bagian terpenting dari kesiapan penerapan TI yaitu kesiapan infrastruktur. Kesiapan infrastruktur ini terdiri dari ketersediaan jaringan internet, kualitas dan bandwidth jaringan internet, akses internet bagi setiap pegawai, koneksi antar computer (LAN), ketersediaan komputer dan tingkat keamanan jaringan.

Inspektorat Kabupaten Sumenep menggunakan jaringan internet dari speedy atau indiehome. Pada masing-masing ruangan, mulai dari sekretariat sampai dengan 5 (lima) ruangan inspektur pembantu sudah terpasang jaringan internet semua melalui konek wifi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh FF :

“jaringan internet sudah terpasang pada masing-masing ruangan mulai dari sekretariat sampai dengan di ruangan masing-masing Irban dengan menggunakan speedy dan koneksi wifi. Rata-rata jaringan internetnya kami ambil yang 2 mbps. Namun sepertinya kualitas jaringan speedy akhir-akhir ini berkurang, koneksi sering tersendat”

Selanjutnya narasumber lainnya bapak AK menambahkan bahwa kendala pada jaringan internet yang terpasang di ruangan masih terbatas karena kapasitas Mbps-nya sehingga terkendala pada kecepatan pada saat browsing. Terkait permasalahan tersebut, bapak FF mengaku akan menghubungi pihak Telkom untuk mengecek kembali kondisi jaringan internet di Inspektorat Kabupaten Sumenep. FF juga menambahkan bahwa jika memang diperlukan untuk menambah kapasitas bandwidth internet, maka hal tersebut akan dilakukan. Selain itu, solusi lainnya yaitu berlangganan dedicated internet kepada provider lainnya. Solusi lainnya yaitu dengan menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai *leading sector* penyediaan infrastruktur TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Kesiapan infrastruktur lainnya berupa koneksi antar computer (LAN). Menurut FF, dari computer yang ada, hanya 10 % saja yang terkoneksi LAN, sisanya tidak. Komputer yang terkoneksi LAN tersebut hanya untuk mengakses SIM HP saja. Walaupun terkoneksi LAN, namun tidak diatur untuk bisa berbagi file. Jadi semua komputer yang ada tidak dapat berbagi file. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan tentang pengelolaan informasi dan sharing informasi sehingga hal tersebut tidak dilaksanakan. Kesiapan infrastruktur berupa ketersediaan jumlah komputer sudah sangat memadai. Menurut FF, tersedia 54 unit komputer dan laptop bagi 58 pegawai Inspektorat Kabupaten Sumenep. Itu berarti hampir semua pegawai menggunakan 1 (satu) unit komputer atau laptop kecuali pegawai bagian pengantar surat dan supir. Selanjutnya mengenai keamanan data, hal tersebut baru akan dipikirkan pada tahun depan bersamaan dengan pengoperasian aplikasi-aplikasi baru terkait pengawasan. Keamanan data tersebut akan diatur dalam pedoman pengelolaan informasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari Pembahasan di atas yaitu kesiapan infrastruktur dalam penerapan TI untuk pengawasan belum sepenuhnya memadai. Infrastruktur yang memadai yaitu jumlah komputer dan ketersediaan jaringan internet yang baik. Hal yang masih belum memadai yaitu terkait jaringan LAN dan keamanan data, namun kedua hal tersebut dapat segera teratasi karena bukan merupakan hal yang sulit.

e. Kesiapan Lingkungan Eksternal (*external environment readiness*)

Kesiapan lingkungan eksternal dimulai dengan Ketersediaan kebijakan serta peraturan tentang pelayanan informasi di Inspektorat Kabupaten Sumenep. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa kebijakan tentang pedoman dan pengelolaan informasi masih belum ada dan baru akan dibuat pada awal tahun 2020.

Selanjutnya mengenai dukungan eksternal dalam hal ini pemerintah, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan layanan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, menurut FF Kabupaten Sumenep telah mencanangkan diri sebagai *smart city*. Kota pintar (*smart city*) merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan Kabupaten/kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat, tentunya dengan memanfaatkan TI.

Hambatan yang dirasakan saat ini yaitu mengenai kualitas provider jaringan internet yang akhir-akhir ini sering mengalami gangguan, sehingga diperlukan alternative lain atau perbaikan jaringan. Hambatan lainnya yaitu kurangnya daya listrik di Inspektorat Kabupaten Sumenep yang menyebabkan sering terjadinya korsleting listrik. Menurut FF, di tahun 2021 sudah dianggarkan untuk penambahan daya tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa kesiapan lingkungan eksternal dalam mendukung penerapan TI sudah sangat memadai. Dari aspek regulasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat mendukung sekali kebijakan penggunaan TI dalam layanan pemerintahan. Hambatan yang ada hanya seputar kondisi jaringan internet dan PLN, yang perbaikannya sudah dianggarkan selesai pada awal tahun 2021.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Kesiapan lembaga untuk penerapan TI dalam pengawasan terhambat dengan adanya pandemi covid 19. Pengembangan TI sebenarnya sudah berjalan dengan baik yang dimulai dengan proses penyusunan dokumen perencanaan pengembangan TI. Pengembangan Sistem Informasi yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020, sudah dianggarkan kembali di tahun 2021. Kesiapan Lembaga dalam penerapan TI untuk pengawasan internal sudah cukup siap, tinggal menunggu pelaksanaannya pada tahun 2021.
2. Kesiapan SDM untuk penerapan TI dalam pengawasan sudah cukup memadai, terutama di kalangan auditor. Kemungkinan ada kesulitan pada awal pelaksanaan, namun dengan sosialisasi dan pelatihan terus menerus, kesulitan tersebut akan dapat diatasi.

3. Kesiapan informasi untuk penerapan TI dalam pengawasan yang diwakili oleh ketersediaan server dan pedoman pengelolaan informasi masih belum memadai. Pengadaan server terkendala oleh adanya refocusing akibat pandemi covid 19, namun hal tersebut sudah dianggarkan kembali di tahun 2021. Pedoman pengelolaan informasi direncanakan dibuat pada awal tahun 2021
4. Kesiapan infrastruktur untuk penerapan TI dalam pengawasan belum sepenuhnya memadai. Infrastruktur yang memadai yaitu jumlah komputer dan ketersediaan jaringan internet yang baik. Hal yang masih belum memadai yaitu terkait jaringan LAN dan keamanan data, namun kedua hal tersebut dapat segera teratasi karena bukan merupakan hal yang sulit.
5. Kesiapan lingkungan eksternal untuk penerapan TI dalam pengawasan sudah sangat memadai. Dari aspek regulasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat mendukung sekali kebijakan penggunaan TI dalam layanan pemerintahan. Hambatan yang ada hanya seputar kondisi jaringan internet dan PLN, yang perbaikannya sudah diagendakan selesai pada awal tahun 2021.

Daftar Pustaka

- Amani, Tatik., Vidiyastutik, E.D. dan Hudzafidah, Khusnik. (2017). Dampak Teknologi Informasi Terhadap Audit Internal. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis. Universitas Panca Marga Jember.
- Ahmi, Aidi., Saidin, Siti Zabedah dan Abdullah, Akilah. (2014). IT adoption by internal auditors in public sector: A conceptual study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164 (2014), 591–599.
- Gamar, Nur. Dan Djamhuri, Ali. (2015). Auditor Internal Sebagai “Dokter” Fraud Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 107-123. <http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2015.04.6009>
- Mahzan, N. &Veerankutty, F. (2011). IT auditing activities of public sector auditors in Malaysia. *African Journal of Business Management*. 5(5), 1551–1563. DOI: 10.5897/AJBM09.423
- Media Auditor. (2019). *APIP Bersiap Menyongsong Era Industrial 4.0*. Jakarta. Penerbit Inspektorat Jendral Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

- Mutula, S. M., & van Brakel, P. (2006). An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access: Towards an integrated information rich tool. *International Journal of Information Management*, 26(3), 212–223. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2006.02.004
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019
- Sawyer, B.L., Dittenhofer, M. And Scheiner, J. (2006). *Sawyer's Internal Audit*. Cetakan ke-3. Penerjemah : Ali Akbar. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Subkie, Hasan. (2019). Peran IACM Dalam mencetak auditor 4.0. *Media Auditor. Inspektotat Kementrian Pertanian*, 50(4), 10–14.
- Togiman, H. (2000). Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukung Terhadap Upaya Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan. Tesis (tidak dipublikasikan). UNPAD. Bandung.
- Yin, Robert K. (2011). *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.